

**STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA DINAS KOPERASI
DAN UKM KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN**



DIAJUKAN OLEH :

NUPIKA HIRA

4518021032

SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2023



**STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA DINAS KOPERASI
DAN UKM KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
Makassar Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

**NUPIKA HIRA
4518021032**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENERIMAAN

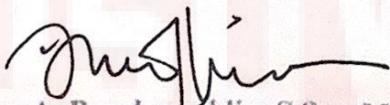
Pada hari Kamis Tanggal 02 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Strategi Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**

Nama : **Nupika Hira**
Nomor Stambuk : **4518021032**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

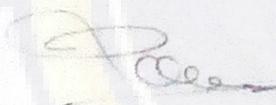
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Makassar, 02 Februari 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian :

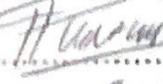

Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si
Ketua


Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si
4. Dr. H. Zainuddin Mustapa, M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Strategi Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Nupika Hira

Nomor Stambuk : 4518021032

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

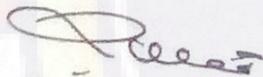
Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 02 Februari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si
NIDN. 0906016701

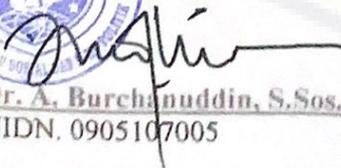


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 0915098603

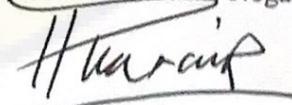
Mengetahui,



Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Nupika Hira
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **Strategi Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**

bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 27 Februari 2023

Penulis,




Nupika Hira

4518021032

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah AWT, atas segala rahmat serta hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “strategi pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (umkm) pada dinas koperasi dan ukm kota makassar provinsi sulawesi selatan” sebagai salahsatu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) tidak lupa mengirimkan shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah MuhamProgram Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi inspirasi dan teladan untuk umat manusia.

Selama proses penulisan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun atas bantuan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak yang terlibat didalamnya sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. untuk itu perkenankanlah penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati mneghaturkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak antara lain, Kepada :

- 1 . Bapak saya yang bernama Peltu kamaruddin, Terima kasih sudah menjadi bapak yang sangat hebat buat saya , Terima kasih atas doa – doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada saya baik moril maupun materil, Terima kasih buat semuanya.
2. (Alm) ibuku yang bernama Nur Asia selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh Sekolah Dasar kelas 2, Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya, dan membuat ibu bahagia di surga sana , Aamiin.
3. Prof. Dr.Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. Rektor Universitas Bosowa Makassar.
4. Dr. Andi Burchanuddin, S.sos., M.Si. Dekan FISIP Universitas Bosowa
5. Drs. Natsir Tompo, M.Si. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Bosowa. Terima kasih pak selalu

- memberikan bantuan, petunjuk, nasehat dan waktu selama proses perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
6. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si Selaku Pembimbing 1 penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat selama proses penyusunan skripsi ini.
 7. Nining Haslinda Zainal, S.sos., M.Si Sebagai Pembimbing 2 penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, ilmu yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini.
 8. Kepala Tata Usaha beserta staffnya dilingkup FISIP Universitas Bosowa, Terima kasih atas segala bantuan selama proses perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
 9. Terima kasih kepada ARASH 18 dan PREMAN 04 saudara – saudari saya yang selalu berproses bersama semasa perkuliahan.
 10. Teruntuk Tante anny, Mama nenek , Mami irma , kakak putri, Tante ulfa dan Om igho, Terima kasih selalu support saya di saat saya lagi down menyusun skripsi, Terima kasih telah memberikan kasih sayang seperti layaknya (Alm) Ibu dan selalu mendengarkan keluh kesahku.
 11. Teruntuk Tante eda, tante anju , Terima kasih atas kebaikannya membantu dan selalu memberi semangat di saat menyusun skripsi.
 12. Teruntuk adik saya Dafa (Amelia khusnul) kasih selalu memberikan masukan yang baik, dan memberi semangat kepada saya.
 13. Teruntuk 09120180138, Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari – cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, pikiran kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa – apa yang kemarin dirasa kurang dan di tambahkan apa – apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah tidak tunduk kepada apa – apa dan memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki manusia lain.
 14. Teruntuk sahabatku Retno dan Sischa , Terima kasih selalu memberikan semangat dan turun menyaksikan momen momen terpenting bagi saya.
 15. Teruntuk sahabatku april, nanda.zal, olla, nita , Terima kasih sudah selalu ada di saat saya membutuhkan dan meminta bantuan soal perkuliahan , Terima kasih sudah menjadi bagian dari penyemangat saya ke kampus bercerita hal apapun itu

, walaupun terkadang menjengkelkan tetapi saya tetap sayang kalian.

16. Teruntuk Teman teman kerja saya Meil,Indy,Al, Terima kasih sudah mengerti keadaan saya yang selalu telat datang kerja, yang selalu memberikan saya semangat kerja di saat lagi pusing pusingnya menyusun skripsi.

17. Teruntuk diri saya sendiri Terima kasih sudah berjuang hingga saat ini, ingat ini bukan akhir tetapi ini adalah awal dari perjuangan yang panjang menuju kesuksesan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan , tetap semangat.

Terima kasih penulis juga ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada semua insan yang tercipta yang pernah bersentuhan dengan jalan hidup penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mungkin masih kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Kebenaran datangny dari Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin

Makassar, 27 Februari 2023

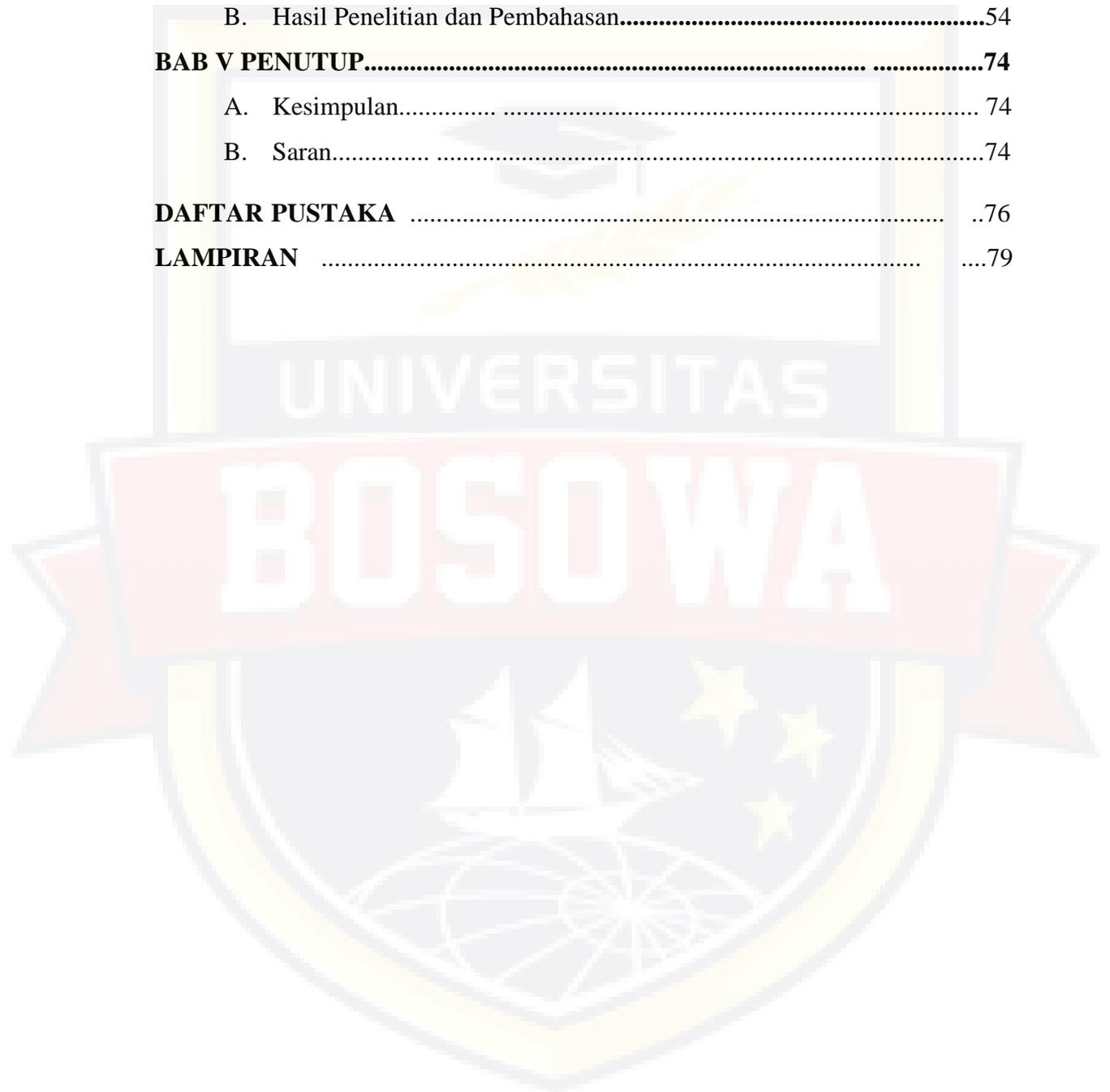
Penulis

Nupika Hira

DAFTAR ISI

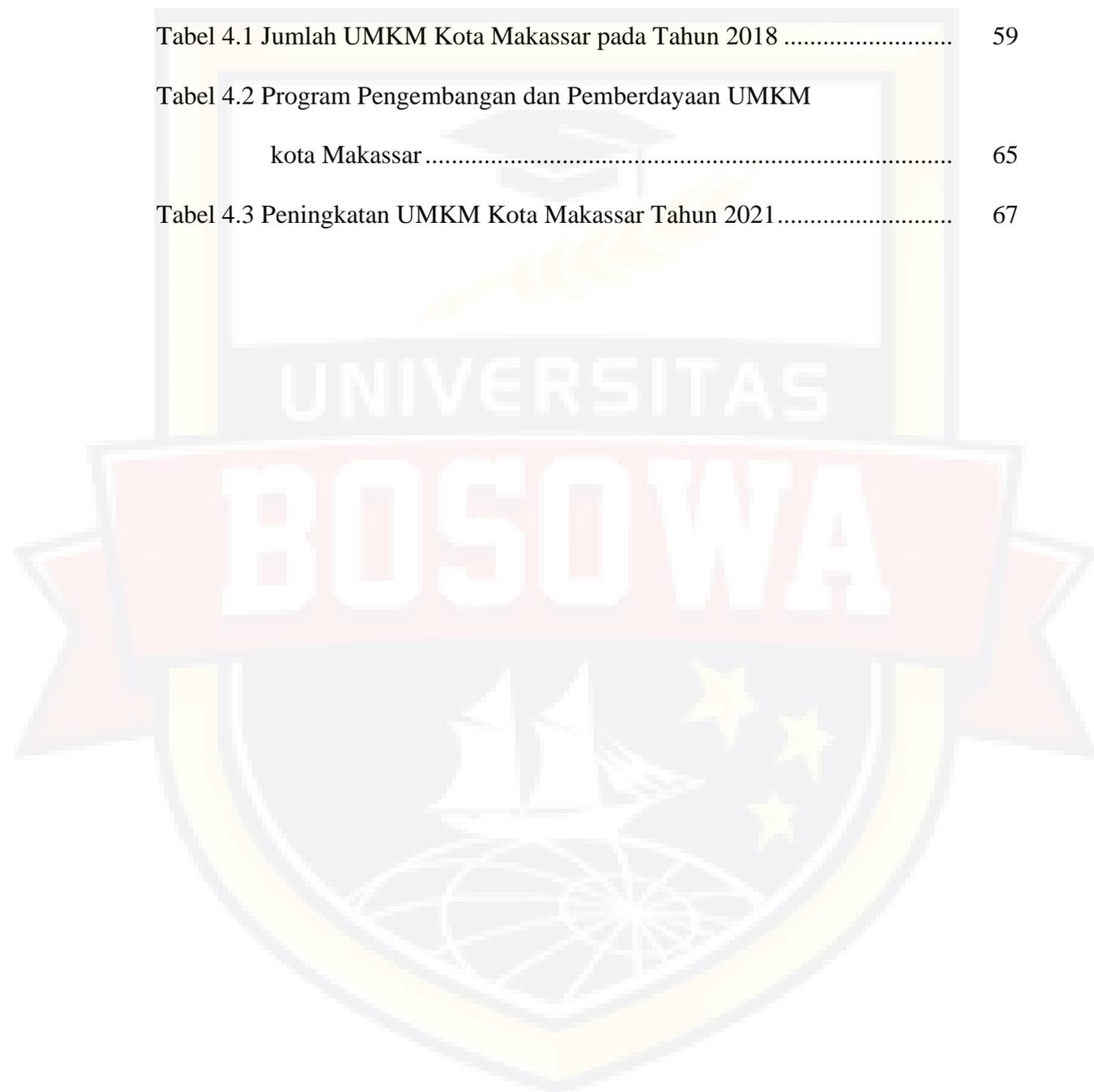
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
HALAMAN PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Strategi	11
B. UMKM.....	13
C. Karakteristik UMKM.....	15
D. Pengembangan UMKM.....	18
E. Pemberdayaan UMKM	20
F. Penelitian Terdahulu.....	28
G. Kerangka Konsep	33
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Informan Penelitian.....	38

E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Metode Analisis Data.....	41
BAB I V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Objek Penelitian	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA76
LAMPIRAN79



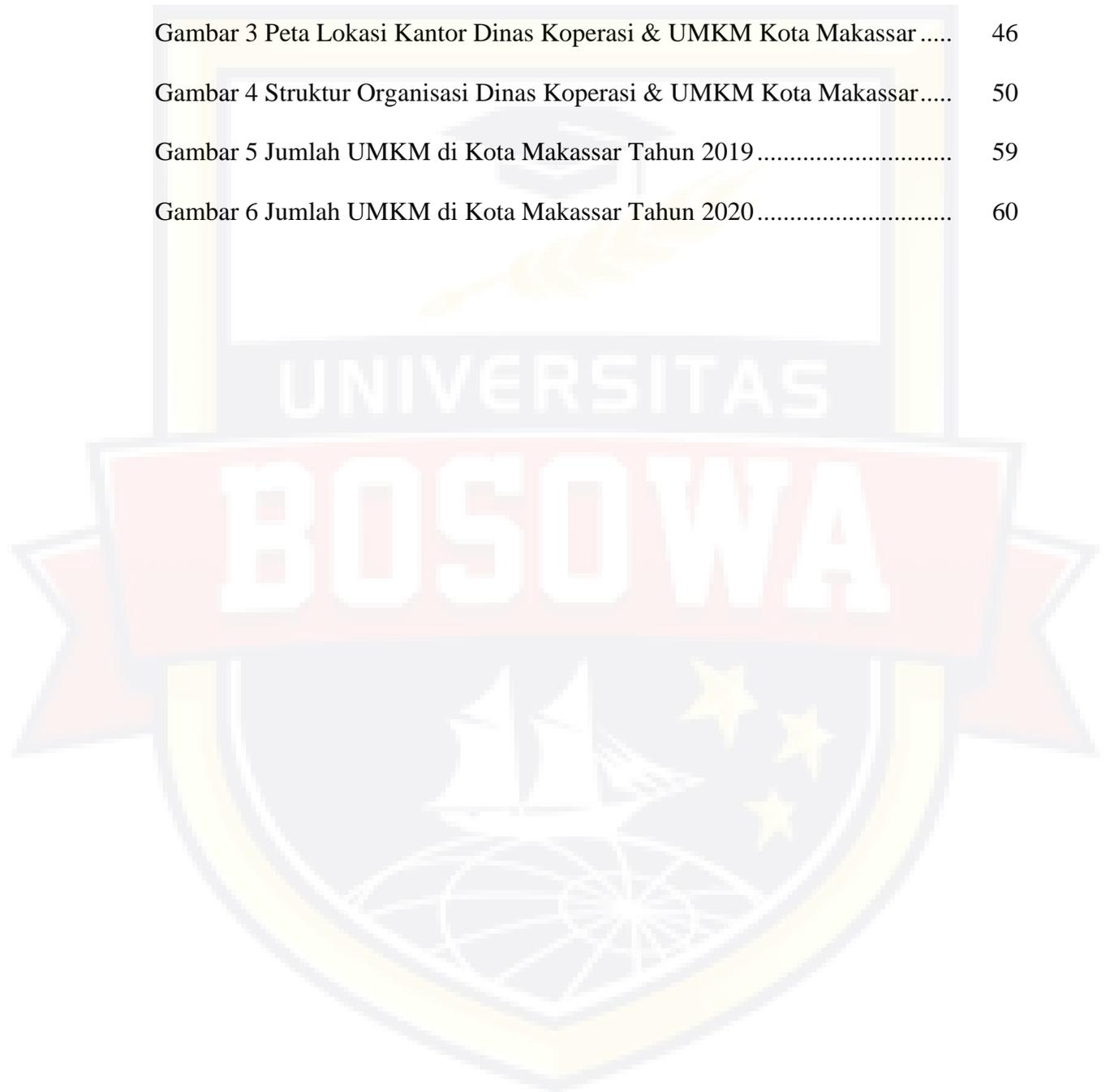
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kota Makassar	6
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan.....	28
Tabel 4.1 Jumlah UMKM Kota Makassar pada Tahun 2018	59
Tabel 4.2 Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM kota Makassar	65
Tabel 4.3 Peningkatan UMKM Kota Makassar Tahun 2021.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Kerangka Konsep.....	34
Gambar 2 Skala Metode Analisis Data	42
Gambar 3 Peta Lokasi Kantor Dinas Koperasi & UMKM Kota Makassar	46
Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi & UMKM Kota Makassar.....	50
Gambar 5 Jumlah UMKM di Kota Makassar Tahun 2019.....	59
Gambar 6 Jumlah UMKM di Kota Makassar Tahun 2020.....	60



ABSTRACT

This research is useful for analyzing what development and empowerment methods are carried out by the City Cooperative and UKM Office. Where there are several development and empowerment programs that have been carried out by the Makassar City Diskop and UKM so that the number of MSME actors is increasing. In this study, the authors analyzed this problem using a concept or strategy according to Suaraja 2007, this concept would then answer what kind of development and empowerment methods were completed by the Municipal Office of Cooperatives and SMEs. In the process of data analysis, the writer also uses a qualitative research type by utilizing secondary data that has been obtained by the author.

Keywords: *UMKM, Office of Cooperatives, Development, Empowerment*

ABSTRAK

Penelitian ini berguna untuk menganalisis terkait apa saja metode pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota . Dimana terdapat beberapa program pengembangan dan pemberdayaan yang telah dilakukan Diskop dan UKM Kota Makassar sehingga jumlah pelaku UMKM semakin meningkat. Pada penelitian ini penulis menganalisa masalah tersebut menggunakan konsep atau strategi menurut suaraja 2007, konsep ini kemudian akan yang menjawab seperti apa metode pengembangan dan pemberdayaan yang terlaksana oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota . Dalam proses analisis data penulis juga menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang telah di peroleh oleh penulis.

Kata Kunci : UMKM, Dinas Koperasi, Pengembangan, Pemberdayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan urusan daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, pemberdayaan dan koreksi peran, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan suatu daerah dan keistimewaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Dani 2018, berkaitan dengan keterkaitan struktur pemerintahan dengan pemerintah daerah, keragaman dan potensi daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Fokus tahun ini juga menyangkut pemberian hak otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah. Selain itu, ini adalah tahun yang penting bagi UMKM: mereka adalah bagian penting dari perekonomian negara atau wilayah mana pun, serta perekonomian Indonesia.

Sebuah bisnis membutuhkan visi dan misi yang jelas, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Bisnis yang sukses membutuhkan seseorang untuk mengembangkan strategi untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Orang yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa itu strategi; namun, mereka masih perlu mengembangkannya.

Menurut David (2011: 18-19), strategi adalah sarana dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi bisnis meliputi ekspansi geografis, tesis, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, retrenchment, divestasi, likuidasi dan joint venture atau usaha patungan. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan pengambilan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang signifikan. Oleh karena itu, strategi adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Koperasi dan usaha kecil, menengah, dan mikro merupakan wakil rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, dan perlu dijunjung tinggi dalam pembangunan nasional. Dengan koperasi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dengan kegiatan ekonomi yang terbuka bagi para anggotanya, maka koperasi akan bekerja dan berkembang atas dorongan anggotanya karena tujuan koperasi adalah mewujudkan kepentingan para anggotanya, pengelompokan. Setelah acara selesai, tetapkan seorang pemimpin yang memiliki wewenang atas anggota kelompok.

Di era globalisasi saat ini, perspektif dunia mengakui bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lain seperti Malaysia, Jepang, Australia, India, Korea. Selatan adalah anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Di negara-negara RCEP, UMKM lebih mendapat perhatian dibandingkan perusahaan besar karena UMKM dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

perekonomian, seperti meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah melalui perpajakan.

Menurut Andrian, (2011) Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan runtuhnya perekonomian nasional. Banyak bisnis besar di berbagai industri mengalami stagnasi atau bahkan terhenti aktivitasnya, yang berujung pada kebangkrutan pada tahun 1998. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk produk nasional, meningkatkan ekspor, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan. Keberadaan usaha kecil tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perekonomian nasional.

Menurut Afiffuddin, (2010:180) Dalam bukunya ia menyebutkan bahwa peran usaha kecil terus berkembang menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah adalah perkumpulan masyarakat yang melihat potensi sumber daya alam dan manusia sebagai usaha baru yang melengkapi kebutuhan ekonomi mereka atau memperkuat ekonomi mereka serta perekonomian Indonesia. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah strategis untuk meningkatkan dan memperkuat sendi-sendi kehidupan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama dengan menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Menurut pandangan Budi, (2011) tentang UMKM adalah bagian dari usaha kecil untuk masyarakat yang pada pendiriannya di dasarkan inisiatif seseorang, sebageian besar masyarakat berfikir UMKM itu adalah hanya

menggunakan *stakeholder* tertentu.UMKM sebenarnya menunjukkan peran dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran yang ada di Indonesia, UMKM mempunyai peran dalam mengatasi pengangguran dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berpotensi pada suatu daerah yang di kelola menyeluruh

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih *kompetitif* bersama pelaku ekonomi lainnya. Strategi pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif, kreatif dan unggul bagi pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan

kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Makassar tahun 2019 menempati posisi pertama tingkat kemiskinan terendah dari 24 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan kualitas koperasi untuk pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat.

Berdasarkan data yang ada bahwa telah terjadi penurunan jumlah unit usaha yang ada di Kota Makassar. Kualitas dari sumber daya manusia yang juga mempengaruhi lambannya unit-unit usaha kecil menengah di Kota Makassar. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM dari beberapa penjelasan pada umumnya memiliki dua *problema* yaitu permasalahan internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yaitu, rendahnya *produktivitas* yang disebabkan oleh kualitas SDM yang dimiliki dalam mengatur atau manajemen organisasinya, kemampuan dalam menguasai teknologi, dan kemampuan dalam memasarkan produk yang mereka miliki. Lemahnya kewirausahaan dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dan terbatasnya *kreativitas*. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di antaranya adalah biaya transaksi akibat usaha yang kurang mendukung, kelengkapan bahan baku, perolehan *legalitas* formal hingga saat ini merupakan masalah

mendasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah, biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan.

Tabel 1.1

Jumlah UMKM Kota Makassar

NO.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Tallo	45
2.	Wajo	25
3.	Tamalate	157
4.	Mariso	517
5.	Mamajang	81
6.	Tamalanrea	25
7.	Bontoala	381
8.	Panakukang	176
9.	Ujung Pandang	354
10.	Makassar	149
11.	Manggal	312
12.	Ujung Tanah	8
13.	Rappocini	385
14.	Biringkanaya	63
15.	Sangkarrang	5
	JUMLAH	2683

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (2018)

Pada data yang disajikan dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Kota Makassar memiliki 2683 UMKM yang tersebar diberbagai kecamatan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Makassar tahun 2019 menempati posisi pertama tingkat kemiskinan terendah dari 24 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan kualitas koperasi untuk pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat.

Berdasarkan data yang ada bahwa telah terjadi penurunan jumlah unit

usaha yang ada di Kota Makassar. Kualitas dari sumber daya manusia yang juga mempengaruhi lambannya unit-unit usaha kecil menengah di Kota Makassar. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM dari beberapa penjelasan pada umumnya memiliki dua *problema* yaitu permasalahan internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yaitu, rendahnya *produktivitas* yang disebabkan oleh kualitas SDM yang dimiliki dalam mengatur atau manajemen organisasinya, kemampuan dalam menguasai teknologi, dan kemampuan dalam memasarkan produk yang mereka miliki. Lemahnya kewirausahaan dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dan terbatasnya *kreativitas*. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di antaranya adalah biaya transaksi akibat usaha yang kurang mendukung, kelengkapan bahan baku, perolehan *legalitas* formal hingga saat ini merupakan masalah mendasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah, biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan.

Beberapa peneliti pernah melakukan Penelitian yang dilakukan oleh SundariPratiwi (2016) tentang Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatra Utara). Dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi Hidayah, adalah dengan memberikan pengetahuan dan pengawasan serta solusi kepada pembudidayaan ayam organik di medan adalah kualitas bibit yang kurang baik, selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan pemahaman masyarakat akan kesehatan juga menyebabkan kegagalan dalam membudidayakan ayam organik di Kota Medan. Berbeda halnya dengan peneliti yang dilakukan oleh Ali Zaenal

Abidin (2017) tentang Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penelitiannya hasil yang di dapat peneliti adalah Strategi pengembangan UMKM Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Koperasi dan UKM Tangerang Selatan sudah sangat cukup baik, Pengembangan UMKM yang selama ini berbentuk pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop* kewirausahaan yang diikuti oleh para pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan sudah memberikan efek bagi beberapa pelaku UMKM, walaupun belum semua UMKM mampu mengimplementasikan apa yang sudah diberikan saat pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, dalam membuat peneliti mengetahui kendala serta hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Makassar, dalam penciptaan strategi yang dilakukan pemerintah saat ini belum mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan saat ini masih belum efektif karena masih banyak UMKM yang belum kondusif dirasakan oleh semua pelaku usaha kecil, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan. Untuk itu, diperlukan sebuah arah untuk meninjau kembali strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mencapai target pengembangan UMKM di Kota Makassar. Jika kondisi ini tidak segera di benahimaka akan menurunkan daya saing usaha kecil itu sendiri. Efek dari hal ini adalah produk yang adalah produk yang di hasilkan oleh usaha kecil , pemula tidak memiliki peluang pasar dan sulit

perkembangannya. Tentunya permasalahan tersebut memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat di Kota Makassar.

Berdasarkan atas fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”**.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Metode Pengembangan UKM di Kota Makassar ?
2. Bagaimana Metode Pemberdayaan UKM di Kota Makassar ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan agar penelitian lebih fokus yaitu :

1. SDM atau Responden yang dipilih berasal dari UMKM di wilayah kota makassar yang terdaftar di BAPPEDA (Badan Perindustrian Daerah) dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pembiayaan modal pada pelaku UMKM.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan atas adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui metode Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Provinsi SULSEL dalam pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui metode Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Provinsi SULSEL dalam pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan ilmupendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dengan strategi pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Provinsi SULSEL.
2. Bagi masyarakat. Manfaat Praktis, Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai dalam peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam masyarakat sekitar .
3. Untuk peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan dan pemahaman mengenai masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Strategi

Menurut pendapatnya Ari Yusuf Hamali, (2018) Strategi saat ini sudah menjadi perbincangan yang sangat umum dan didefinisikan sedemikian rupa untuk kepentingan perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Makna yang terkandung dalam strategi adalah sekumpulan tindakan yang dirancang untuk menyesuaikan antara kompetensi perusahaan dan tuntutan eksternal pada satu industri.

Menurut KBBI, yang diakses dilaman google pada tahun 2022 menjelaskan kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratus = militer dan ag = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut KBBI Strategi /stra-te-gi/ /stratégi/ n adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Pada awalnya konsep strategi di definisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Konsep generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal mula penggunaan konsep strategi yang digunakan dalam dunia militer

Menurut Ismail Solihin, (2009) tentang perencanaan strategi atau *strategic bussiness planning* adalah pendekatan secara teratur dan *pragmatis* yang dapat digunakan organisasi, baik publik maupun swasta dalam pembuatan keputusan saat ini untuk masa depan. Perencanaan strategi adalah proses pengkaji diri, penetapan tujuan, pengembangan strategi dan monitor kerja. Perencanaan strategi ini akan melahirkan fokus yang akan menuntun organisasi dari sekarang sampai keadaan yang ditargetkan untuk masa depan.

Jika dirumuskan secara sederhana, perencanaan strategi adalah sebuah alat manajemen dan sama dengan setiap alat manajemen, alat itu hanya digunakan untuk satu maksud saja, menolong organisasi memfokuskan visi dan prioritasnya sebagai jawaban terhadap lingkungan yang berubah dan memastikan agar anggota-anggota organisasi itu bekerja ke arah tujuan yang sama.

Pendek kata, perencanaan strategi adalah proses sistemik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara *stakeholder* utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Perencanaan strategi khususnya digunakan untuk mempertajam fokus organisasi, agar semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi organisasi itu.

a. Tahap-Tahap Perencanaan Strategi

Selanjutnya dengan mengadopsi konsep perencanaan strategis yang telah dikemukakan Bryson, peneliti meringkas tahap-tahap pada perencanaan strategis sebagai berikut;

1. Identifikasi Fisik, Misi, dan Mandat Dinas Koperasi dan umkm
Identifikasi Fisik, misi dan mandat di pergunakan untuk memahami alasan terhadap suatu kehadiran organisasi pada tujuan apa yang ingin di wujudkan dengan membentuk organisasi, tujuan identifikasi adalah untuk mengenali dan memperjelas tugas dan fungsi yang harus dilakukan pada dinas koperasi dan umkm kota makassar.
2. Visi organisasi merupakan gambaran tentang apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang menajadi pegangang bagi dinas koperasi dinas kota

makassar, dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berkesinambungan sedangkan visi organisasi adalah suatu tujuan yang unik yang dapat melihat serta membedakan serta dengan organisasi yang lain. Perencanaan strategis menurut David (2006:06), intinya adalah, rencana permainan (*game plan*) perusahaan. Seperti halnya tim sepak bola memerlukan rencana permainan untuk memiliki peluang menang, perusahaan harus memiliki rencana strategis yang baik untuk bisa sukses berkompetisi atau bersaing. Apabila manajemen strategis mengacu pada formulasi, implementasi, dan evaluasi, sedangkan perencanaan strategis hanya mengacu pada formulasi strategi.

B. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

a. Pengertian UMKM

UMKM didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda tergantung pada aspek-aspeknya. Di Indonesia, terdapat beberapa definisi UMKM berdasarkan lembaga yang mendefinikannya, diantaranya :

1. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :
 - a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.

c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. (Kementerian keuangan, 2012).

2. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

a) Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.

b) Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. (Kementerian keuangan, 2012).

3. Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi UMKM, diantaranya adalah:

a) Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

b) Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu; industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan sumber daya manusia.

Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. (Maxmore, 2018)

C. Karakteristik UMKM

Isnaini Harahap, (2016) mengemukakan bahwa karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha – usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, terkelola dengan tidak baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

1. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* sehingga standarkualitasnya beragam.
2. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
3. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.
4. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
5. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

6. *Kontinuitas* produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya. (Bank Indonesia, 2015).

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008, kriteria UMKM adalah:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah).

- d. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

D. Pengembangan UMKM

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, *teoritis*, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “Pengembangan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh”. Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “Pengembangan mengacu pada staf atau personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah suatu prosedur yang *sistematis* dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”.

Marliyah, (2016) mengemukakan pendapatnya tentang pengembangan dan pembinaan UMKM perlu dilakukan untuk menumbuh- kembangkan UMKM di Indonesia menjadi UMKM yang kuat dan tangguh menghadapi segala situasi perekonomian. Pengembangan sektor UMKM bertumpu pada mekanisme pasar yang sehat dan adil. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan pembinaan UMKM adalah pemerintah, badan usaha dan masyarakat.

Imsar, (2018) menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan

meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produk dari kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai tujuan.

Sementara kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian *fasilitas* bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

- 1) Produksi dan pengolahan
- 2) Pemasaran
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Desain dan Teknologi

Pengembangan usaha tersebut juga melibatkan Dunia Usaha serta masyarakat dalam berperan serta secara aktif untuk melakukan proses pengembangan tersebut di atas.

Menurut Ariani, (2017) menyatakan pengembangan UMKM berbasis daya saing, dan strategi yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu perusahaan. Kekuatan dalam artian disini adalah kekuatan yang menuntungkan usaha tersebut yaitu dengan pengembangan

produk. Kelemahan disini adalah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha karena persaingan bisnis yang terjadi. Peluang merupakan strategi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha jika peluang tersebut besar atau banyak, jadi pelaku usaha bisa melakukan inovasi produk tersebut. Ancaman suatu perusahaan yaitu persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, karena dalam dunia usaha ancaman terbesar adalah persaingan sesama usaha atau bisa juga menjual produk yang sama.

Setyanto, (2015) mengemukakan pendapatnya dalam pengembangan UMKM itu banyak tantangan yang dihadapi di dalamnya, untuk memperkuat hal itu perlu diadakan pembinaan yang lebih mengarahkan untuk kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil. Lemahnya kemampuan *management* dan sumber daya manusia mengakibatkan UMKM tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, karena hal tersebut pengembangannya kurang baik

E. Pemberdayaan UMKM

Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara *sinergis* dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk

memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara *sinergis* melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasaratas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas Efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing. Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga

terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas Kemandirian adalah usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM (UU No. 20/2008).

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No.20/2008) adalah:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sijabat, peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM mengatakan upaya pemberdayaan UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang. Dalam upaya mendorong percepatan proses pemberdayaan UMKM selama era reformasi juga terlihat sudah cukup banyak isu politik yang seharusnya dapat mempercepat (*akselerasi*) proses pemberdayaan koperasi dan UKM. Disinilah mungkin letak pokok permasalahannya. Kalangan UMKM serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan kelompok masyarakat banyak tersebut. Belum efektifnya isu-isu politik yang berkembang selama era reformasi mengindikasikan bahwa proses komunikasi politik sendiri belum berjalan baik. Sesungguhnya komunikasi politik yang efektif diharapkan dapat dibangun dan ditumbuhkan oleh para *eksponen* yang bergerak dalam pemberdayaan UMKM. Dengan kondisi yang masih seperti sekarang jangan diharapkan akan ada tenggang rasa dari para pengusaha besar kepada pengusaha kecil. Belajar dari pengalaman masa lalu untuk bermitra antara pengusaha kecil dan pengusaha besar harus dipaksa dan diikat dengan peraturan formal, begitupun belum dapat berjalan dengan efektif.

Lebih lanjut Sijabat mengatakan pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi medium penumbuhan UMKM. Merancang konsepsi dasar pemberdayaan UMKM adalah membangun sistem yang

mampu mengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan UMKM adalah iklim usaha. Aspek itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang dibangun, sedangkan sistem yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (*actor*) dan banyak *variable* (faktor) yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang (*multies years*). Oleh karena sifatnya tersebut maka faktor-faktor ini sulit diukur keberhasilannya sebagai buah karya suatu instansi atau suatu rezim pemerintahan. Oleh sebab itu *kondusifitas* dari setiap faktor tersebut harus ditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi dari setiap faktor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan *evaluasi* setiap waktu, setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM. Seberapa jauh keberhasilan membangun sistem pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari seberapa besar angka pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan usahanya.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, keterlibatan stakeholder sangat menentukan keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan *stakeholder* UMKM antara lain terdiri dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi usaha. Menurut Karsidi dan Irianto (2005) keterlibatan yang ada masih bersikap sendiri-sendiri dan kurang *intergratif* antara *stakeholder* satu dengan yang lain. Berikut diberikan pola *alternatif* hubungan antar peran masing-masing *stakeholder* UMKM yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan UMKM:

1. UMKM

UMKM sebagai pelaku memegang peran yang sangat kunci dalam

rangka pemberdayaan mereka sendiri. Dalam memberdayakan UMKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitasi yang diberikan oleh berbagai pihak (*stakeholder* yang lain) karena tanpa partisipasi UMKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan. Namun demikian perlu disadari bahwa untuk setiap program pemberdayaan harus berangkat pada pemenuhan kebutuhannya, meski kadang untuk menentukan kebutuhan tersebut membutuhkan pendampingan pula.

2. Kelompok / Koperasi

Beragamnya jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan beragam perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat masalah demi masalah, apakah ada masalah yang perlu penanganan secara kelompok atau dilakukan secara individual. Masalah permodalan misalnya akan lebih mudah penanganannya dengan sistem kelompok karena dapat mengurangi resiko dan mudah dalam pembinaannya. Kalau kelompok usaha mikro kemudian menjadi lebih besar dan teradministrasi dengan baik, maka kemudian dapat dikembangkan menjadi koperasi. Melalui koperasi diharapkan bisa memperkuat kekuatan tawar pasar baik dalam mendapatkan bahan baku maupun penjualan produk.

3. BDS (*Bussines Development Services*)

BDS ini berperan sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai aspek, seperti aspek manajemen, produksi, pasar dan pemasaran bahkan sampai fasilitasi dalam menghubungkan UMKM ke lembaga keuangan baik

bank maupun non bank. Idealnya jasa layanan yang diberikan BDS harus dapat ditanggung pembiayaan oleh UMKM sendiri, namun sampai saat ini belum banyak UMKM yang mampu menanggung atas jasa yang diterima. BDS dapat didirikan oleh Perguruan Tinggi, LSM maupun swasta.

4. Asosiasi Usaha

Asosiasi Usaha dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek melalui anggotanya terutama dalam hal ini kaitannya dengan pasar akan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan, baik dalam harga maupun sistem pembayaran dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

5. Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank)

Salah satu masalah klasik pemberdayaan UMKM adalah masalah kekurangan modal, namun UMKM enggan untuk datang ke bank khususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Sebaliknya sering lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan “modal” yang dihimpun dari masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepada pengusaha UMKM dengan aman. Artinya ke dua belah pihak sebenarnya dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Untuk itu perlu diupayakan pendekatan baru perbankan terhadap UMKM, salah satunya dengan pendekatan melalui kelompok simpan pinjam (KSM) maupun kelompok usaha (koperasi) dalam memberikan layanan kredit terhadap UMKM.

6. Pasar

Pasar perdagangan hasil produksi UMKM dapat berupa pasar dalam negeri

(domestik) maupun pasar ekspor. Hubungan baik antara pelaku UMKM dan pelaku pasar (pembeli maupun eksportir) perlu dijaga kesinambungannya. Demikian pula dengan adanya perubahan kondisi pasar harus cepat dapat diantisipasi. Dalam hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah, BDS maupun asosiasi usaha.

7. Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran yang dalam memfasilitasi UMKM Lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM seperti koperasi, Asosiasi, BDS, dan lembaga keuangan dapat digerakkan oleh pemerintah dengan kebijakan tertentu.

Menurut Suarja, (2007) pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan melalui:

- a. *revitalisasi* peran koperasi dan perkuatan posisi UMKM dalam sistem perekonomian nasional dan
- b. *revitalisasi* koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan
- d. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal.

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mempercepat pemberdayaan UMKM antara lain;

- a. tersedianya SDM yang berkualitas dan professional
- b. tersedianya dukungan regulasi yang kondusif
- c. tersedianya pengawasan yang efektif
- d. tersedianya teknologi informasi yang murah, dan

- e. tersedianya pembiayaan modal yang mudah diakses

(Baseline Report, 2000 dalam Assery, 2009).

F. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	SundariPratiwi (2016)	Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik(Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatera Utara).	Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk	Pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Hidayah adalah dengan memberikan pengetahuan dan pengawasan serta solusi kepada pembudidayaan ayam organik di Medan. Beberapa faktor kegagalan pembudidayaan ayam organik di Medan adalah kualitas bibit yang kurang baik. Selain itu kurangnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat akan kesehatan juga menyebabkan kegagalan dalam membudidayakan ayam organik di Kota Medan.

			diamati dan dianalisis dengan cermat sampai tuntas.	
2.	Ali Zaenal Abidin (2017)	Strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan	<p>Pada penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif.</p> <p>Dimana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan dan analisis bahanbahan tertulis sebagai sumber data utama.</p>	<p>Strategi Pengembangan UMKM Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Koperasi dan UKM Tangerang Selatan sudah cukup baik. Pengembangan UMKM yang selama ini berbentuk pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop kewirausahaan yang diikuti oleh para pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan sudah memberikan efek positif bagi beberapa pelaku UMKM, walaupun belum semua UMKM mampu mengimplementasikan apa yang sudah di berikan saat pelatihan</p>

				yang di adakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan.
3.	MaulindaRusdiana(2016)	Strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.	<p>Pada penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif.</p> <p>Dimana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan dan analisis bahanbahan tertulis sebagai sumber data utama.</p>	<p>Strategi Pengembangan UMKM Kota Tangerang Selatan olehDinas Koperasi dan UKM Tangerang Selatan sudah cukup baik. Pengembangan UMKM yang selama ini berbentuk pelatihan,bimbingan teknis maupun workshop kewirausahaan yang diikuti oleh para pelakuUMKM di Kota Tangerang Selatan sudah memberikan efek positif bagi beberapa pelaku UMKM, walaupun belum semuaUMKM mampu</p>

				<p>mengimplementasikan apa yang sudah di berikan saat pelatihan yang di adakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan.</p>
4.	Suci Astari (2019)	<p>Strategi dinas koperasi dan ukm kabupaten Langkat dalam pengembangan sektor usaha mikro kecil danmenengah (UMKM).</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dilakukan dengan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan strategi perkuatan yang diimplementasikan dalam program kerja penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan kegiatan fasilitasi pengembangan UMKMdi Kabupaten Langkat.Implikasi dari strategi yang dilakukanDinas Koperasi dan UKM</p>

				<p>Kabupaten Langkat adalah naiknya omzet, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi peserta pelatihan serta membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan modal.</p>
5	Senen Machmud dan Iwan Sidharta(2013)	Model Kajian Pendekatan Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Sektor UMKM di Kota Bandung	<p>Pada penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif. Dimana penulis menggunakan wawancara dan observasi langsung ke lapangan</p>	<p>Perkembangan usaha kecil menengah (UKM) di Kota Bandung dapat dilakukan dengan pendekatan strategis dengan mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah (UKM) kemudian melakukan analisis terhadap keunggulan UMKM dan kesuksesan UMKM kemudian dilakukan analisis SWOT kelemahan, yang pada akhirnya dilakukannya suatu rumusan konsep pengembangan UMKM dan tujuan secara sasaran yang ingin dicapai sehingga diperoleh strategi pengembangan UMKM dengan mengeluarkan suatu kebijakan mengenai perkembangan UMKM, program pengembangan UMKM, dan kegiatan pengembangan UMKM.</p>

(Sumber : Hasil olah data)

G. Kerangka Konseptual Penelitian

Eksistensi UMKM di kota makassar mempunyai potensi untuk dapat lebih tumbuh dan berkembang. Hal ini berangkat dari fakta-fakta *empirik* yang menunjukkan adanya tingkat perkembangan dari waktu ke waktu. Pada masa krisis hingga saat ini, sektor UMKM menjadi alternatif pemenuhan kesempatan kerja bagi sekian banyak suplai tenaga kerja yang ada.

Selain itu, UMKM dapat dijadikan sebagai katup pengaman terhadap kondisi ekonomi yang selalu berubah dan terdapat *resistensi* kondisi ekonomi. Maka dari itu, sangat dibutuhkan adanya suatu usaha untuk lebih mengembangkan potensi sektor UMKM baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Berikut kerangka pemikiran ini dapat diperjelas dalam skema berikut ini :

Gambar 1
Model Kerangka Konsep



(Sumber: Hasil Olah Data)

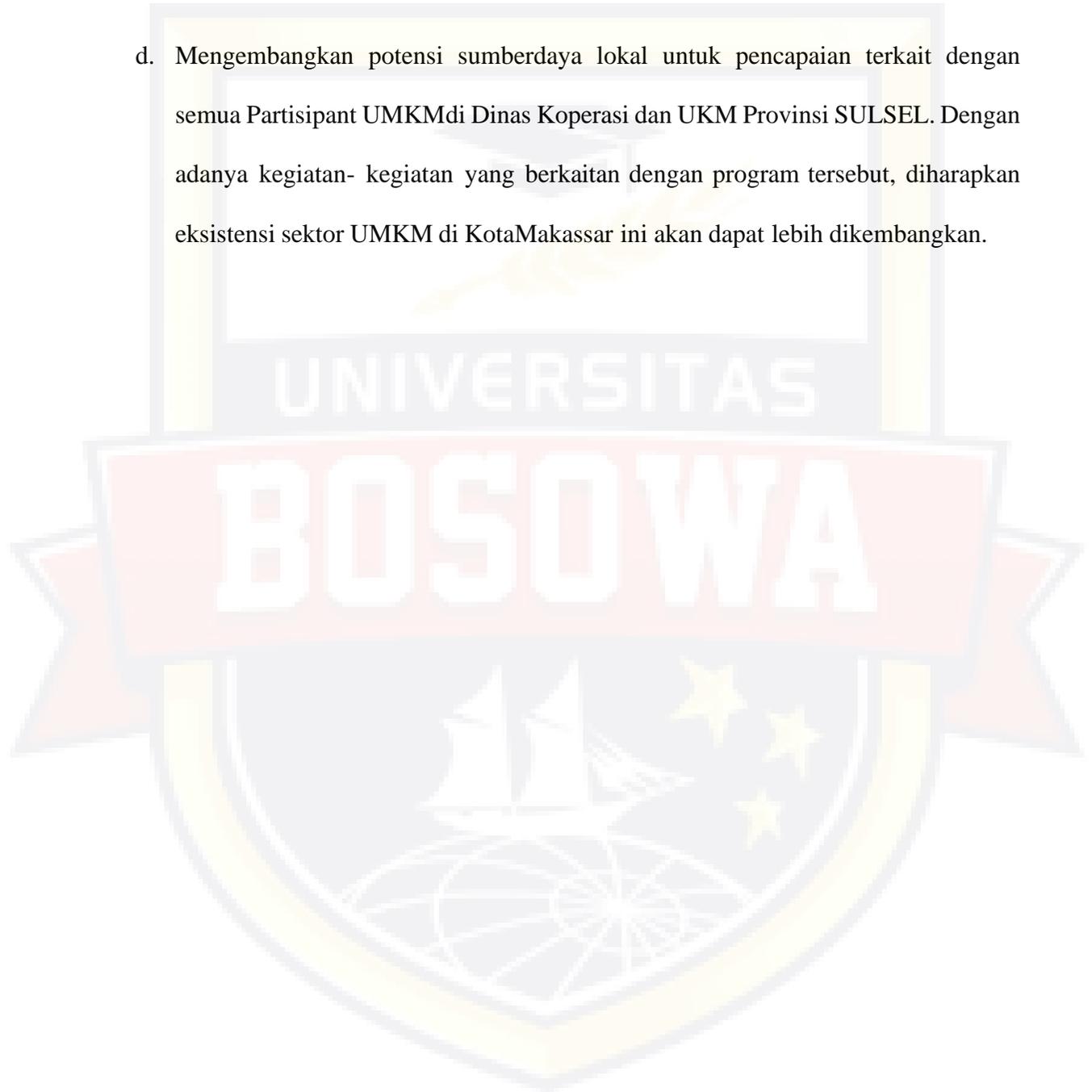
Dalam usaha pengembangan UMKM, pada umumnya mengalami berbagai hambatan- hambatan. Antara lain pada kualitas SDM yang masih rendah, keterbatasan biaya, dan juga terbatasnya kemampuan dalam hal pemasaran. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi SULSEL di Kota Makassar mempunyai tanggungjawab teknis bagi pengembangan sektor UMKM di Kota Makassar. Sebagai konsekuensinya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi SULSEL di Kota Makassar menyusun strategi untuk mengembangkan potensi sektor UMKM. Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi SULSEL di Kota Makassar ini meliputi metode pengembangan berupa pengumpulan data, penyusunan rencana dan pelaksanaan program. Metode tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang telah disusun melalui indikator pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna pada UMKM menurut suarja (2007)

- a. revitalisasi peran koperasi dan perkuatan posisi UMKM dalam sistem perkonomian nasional dan menghidupkan dan menggiatkan (kembali) faktor-faktor pembangunan (tenaga kerja, modal, ketrampilan dan kewirausahaan, ditambah kelembagaan keuangan, birokrasi, serta didukung sarana/prasarana fisik dan para pelaku pembangunan untuk mengakomodasikan secara struktural dan fungsional tantangan dan kebutuhan baru.
- b. revitalisasi koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha , dan melakukan langkah-langkah penting dalam membantu UMKM memanfaatkan media digital. Dan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ke depan adalah layanan internet yang lebih terjangkau, peningkatan literasi digital secara inklusif, akses pinjaman modal yang mudah, serta menambah keterampilan

baru bagi bisnis berdampak.

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan membantu ekonomi masyarakat

d. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal untuk pencapaian terkait dengan semua Partisipant UMKMd Dinas Koperasi dan UKM Provinsi SULSEL. Dengan adanya kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut, diharapkan eksistensi sektor UMKM di KotaMakassar ini akan dapat lebih dikembangkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan dan melakukan analisa secara *obyektif* dalam arti hasil penelitian ini akan lebih menekankan pada gambaran mengenai obyek penelitian yang sebenarnya.

Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menyusun gambaran mengenai obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, lalu data tersebut diolah dan diartikan untuk kemudian dapat melakukan analisa dan *interpretasi* dari data yang telah disajikan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Koperasi dan UKM provinsi Sulawesi selatan di kota Makassar. Adapun pemilihan lokasi tersebut karena penulis melihat bahwa sektor UMKM yang ada di kota Makassar jumlahnya cukup banyak, selain itu potensi penghasilannya juga cukup besar. Sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Tentu saja hal ini tidak lepas dari campur tangan Dinas Koperasi dan UKM dalam menangani pengembangan sektor UMKM tersebut, melalui strategi-strategi yang telah disusun. Lokasi yang dijadikan

objek penelitian beralamat di JL. Balai kota, kota Makassar, Sulawesi selatan, dengan waktu penelitian kurang lebih 1 Bulan (Agustus – September 2022).

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tulisan yang berupa gambaran umum perusahaan, maupun informasi langsung yang menyangkut kebijakan perusahaan. Sumber data dalam penulisan ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melalui pengamatan, wawancara langsung pada perusahaan sebagai objek penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data berupa data yang diperoleh dari dokumen dokumen perusahaan dan pencatatan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

D. Informan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau perusahaan yang terlibat langsung dalam penelitian dan berperan sebagai pemberi informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan:
Andi Tenri Beda, S.AP
- b. PLT KASI Pengawasan dan Penilaian:
Lukman, S.Sos
- c. Para Staff Subdin UMKM:
Hendra Wijaya, S.E

d. Pelaku UMKM:

Cafe Tetes Kopi



2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah data-data yang terjadi selama proses pembinaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UKM provinsi SULSEL di kota Makassar tahun 2021 sampai sekarang.

- a. Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Omset Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Metode pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik data yang dilakukan dengan cara yang ingin diteliti atau melalui percobaan (*eksperimen*). Cara efektif jika ingin menggunakan metode observasi adalah dengan melengkapinya dengan pengamatan dalam bentuk *checklist* sebagai terhadap masalah yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi serta informasi-informasi lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang akan diamati adalah kegiatan atau aktivitas yang berlangsung pada saat proses produksi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada orang yang diselidiki atau responden untuk mendapat data yang akurat. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi.

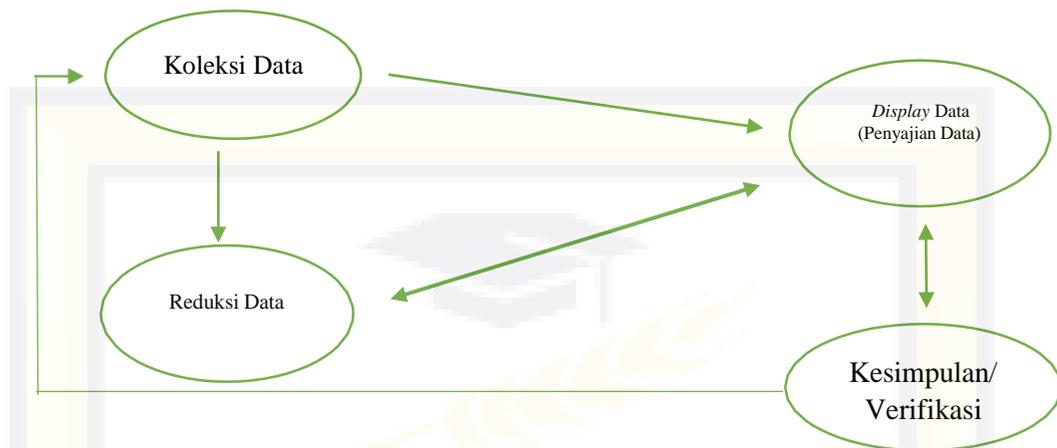
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Berdasarkan masalah pokok dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka metode analisis yang digunakan yaitu analisa deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti sehingga menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Skema metode analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2
Skema Metode Analisis Data



(Sumber : Sugiyono, 2011:247)

Berikut penjelasan gambar di tersebut :

1. Koleksi data, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Dinas Koperasi dan UKM provinsi Sulawesi selatan di kota Makassar.
2. Reduksi data, Mereduksi data adalah proses mempertegas, memperpendek, menyeleksi, membuat fokus, membuang yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.
3. *Display Data*, Merupakan kegiatan pengorganisasian data, agar tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan/Verifikasi, Dalam awal pencarian data, peneliti harus sudah mengerti apa arti hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi- konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi. Berbagai hal tersebut dipegang oleh peneliti tidak secara kuat, artinya tetap bersikap terbuka, yang awalnya kurang jelas, kemudian semakin meningkat secara *eksplisit* hingga memiliki landasan yang kuat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kantor Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar

Berpacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 terkait suatu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) serta Peraturan Walikota Kota Makassar 98 Tahun 2016 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016) maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar memiliki beberapa tugas pokok guna untuk membantu Walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Melakukan evaluasi, pelaporan dan Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan

4. Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang perkoperasian serta;
6. Pembinaan unit pelaksanaan teknis.

Dengan peraturan daerah ini, maka penduduk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah dibidang industri pertanian, industry non pertanian, perdagangan aneka usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
2. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan pengusaha kecil mikro melalui pengelompokkan usaha diwilayah tertentu;
3. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana program penyusunan proyeksi perkembangan pengusaha kecil, tangguh, unggul, mandiri dan menengah dibidang industri pertanian, persagangan dan aneka usaha; d. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pengidentifikasian
4. pengusaha kecil, tangguh, unggul, mandiri dan menengah bidang industri pertanian,

industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha;

5. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis kerjasama dalam kemitraan jaringan usaha antara usaha kecil dan menengah dalam rangka kemitraan dan jaringan usaha;
6. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan peningkatan wawasan dan keterampilan pengusaha kecil dan Koperasi melalui pelatihan, magang, studi banding dan pameran;
7. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha;
8. Melakukan pengelolaan terhadap administrasi urusan tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Jalan Balaikota, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun gambaran lokasinya terlampir sebagai berikut :

Gambar 3
Peta Lokasi Kantor Dinas Koperasi & UKM Kota Makassar



3. Visi dan Misi Dinas Koperas dan UKM Kota Makassar

a. Visi

Visi adalah visi tentang di mana dan bagaimana lembaga pemerintah harus terlibat dan bekerja agar selaras dan hadir, dapat diprediksi, inovatif dan produktif. Visi tidak lain adalah gambaran dan cita-cita keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintah, dan dengan mengacu pada keterbatasan tersebut maka visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah sebagai berikut: “Mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang tangguh, Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Berdaya Saing dalam Pembangunan Daerah” Untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi, maka setiap pegawai dan pemangku kepentingan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar harus dapat memahami arti dari visi tersebut sebagai berikut. :

1. Makna dari pencapaian visi “Competitive Doing Business” adalah sebagai berikut: Mewujudkan Dunia Usaha yang Lebih Kompetitif : Merupakan deklarasi semangat untuk terus mendorong keunggulan dan daya saing pada semua jenis usaha ekonomi di Makassar melalui penerapan teknologi, Investasi pembangunan dan peningkatan produktivitas, dalam kancah persaingan global, menjadikan penggunaan sumber daya lokal lebih efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi Kota Makassar.

2. Pengembangan ekonomi daerah: Adanya segala upaya konsisten dan progresif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif dalam masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan teknologi untuk mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia secara optimal dan bijaksana melalui kegiatan industri, perdagangan Koperasi dan Investasi yang berwawasan lingkungan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

a. Misi

Misi Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (Tahun 2014-2019) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

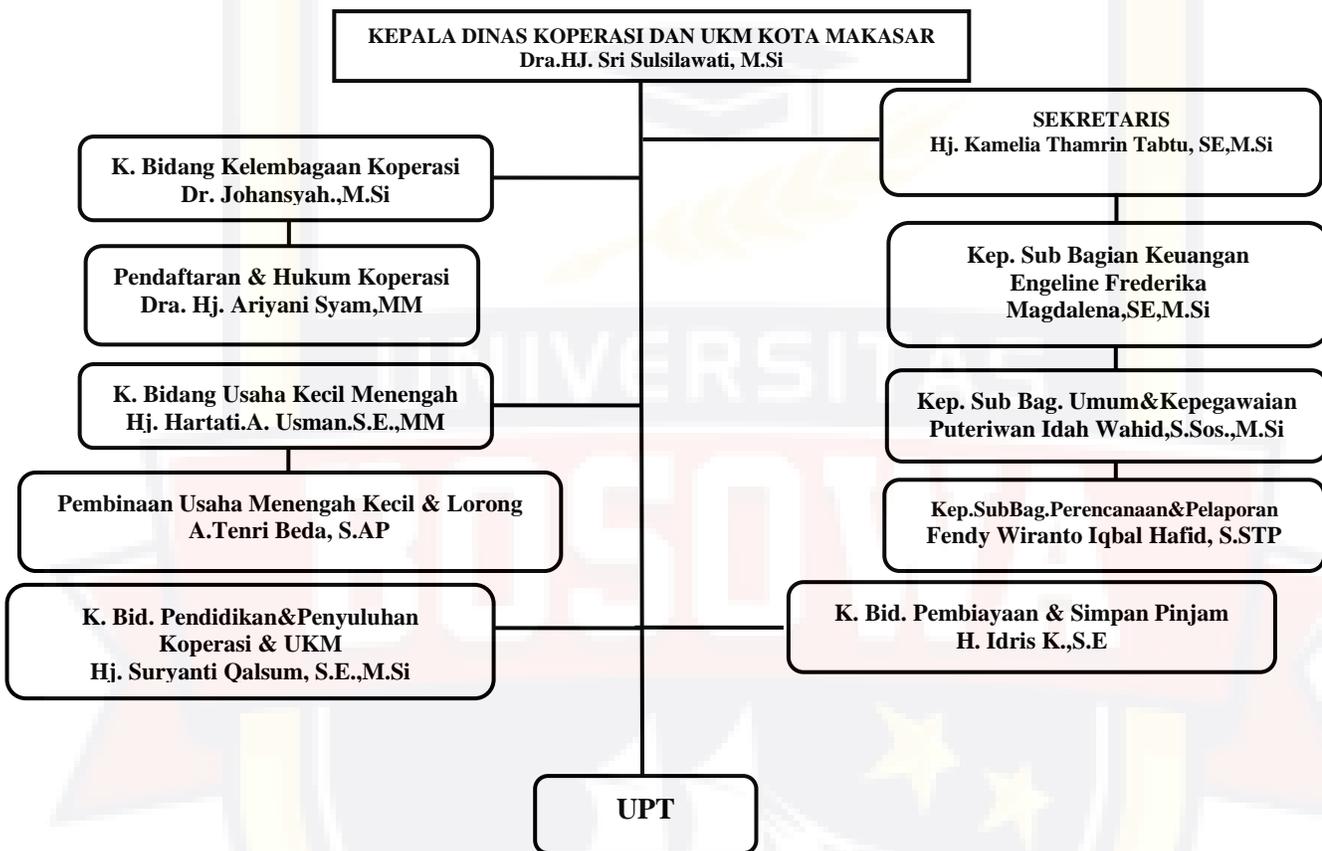
1. Meningkatkan peranan dan daya dukung organisasi unit kerja bagi pengembangan kegiatan berusaha serta meningkatkan kapasitas meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UKM;
2. Membangun sinergitas positif antar Koperasi, UKM dan masyarakat dalam peningkatan produktifitas;

3. Meningkatkan daya saing komoditi unggulan daerah dengan pemanfaatan sumber daya lokal untuk kemandirian Koperasi dan UKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
4. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk memberi peluang dalam menggarakkan regulasi usaha;
5. Memberikan peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan UKM dengan training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa anggaran

BOSOWA

4. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Gambar 4
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar



Sumber : Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar diatas, maka terbagi beberapa tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari masing-masing jabatan diantaranya adalah :

a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas di bantu oleh 3 Kepala Subbagian yaitu :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

b. Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, manajemen dan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan administrasi, organisasi dan usaha koperasi serta perangkat koperasi

2. Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan Koperasi, dan pemrosesan pengesahan Badan Hukum, Amalgamasi, pembubaran koperasi serta mengevaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagai bahan laporan.
 3. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang kelembagaan dan usaha Koperasi Perkotaan
- c. Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang industri pertanian, industri non-pertanian, perdagangan aneka usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang UKM di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :
1. Seksi Industri Non-Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengusaha kecil dan menengah bidang industri non pertanian
 2. Seksi Pemasaran dan pengembangan Aneka Usaha mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan inventarisasi, memberi bimbingan, memonitor, dan mengevaluasi, serta melakukan konsultasi dalam rangka pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah bidang Perdagangan dan Aneka Usaha.
 3. Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan Koperasi, dan pemrosesan pengesahan Badan

Hukum, Amalgamasi, pembubaran koperasi serta mengevaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagai bahan laporan.

4. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang kelembagaan dan usaha Koperasi Perkotaan
- d. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam yang mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan perencanaan fasilitasi permodalan, pengawasan dan penilaian koperasi. Dalam Melaksanakan Tugasnya, Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :
1. Seksi Pengawasan dan Penilaian mempunyai tugas menyusun rencana dan memberi petunjuk, mengkoordinasikan penilaian pemeriksaan kegiatan. Serta menyusun konsep rencana program permodalan.
 2. Seksi Pembiayaan Permodalan Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan, mengklaksifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan koperasi.
 3. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana mempersiapkan, mengklaksifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan usaha kecil dan menengah.
- e. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan

penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah. Dalam Melaksanakan Tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan UKM di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

1. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pendidikan dan penyusunan koperasi, melakukan kerjasama dan melaksanakan tugas
2. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pendidikan dan penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Melakukan kerjasama dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan UKM.
3. Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyusun rencana, dan mengkoordinasikan semua data yang diperlukan sebagai bahan informasi

B. Metode Pengembangan menurut Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Konsistensi UMKM di Kota Makassar memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang, hal ini berdasarkan data yang terlampir pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu. Sektor UMKM juga dapat dijadikan sebagai alternatif dari banyak kesempatan kerja penyedia tenaga kerja yang ada. Tidak hanya itu, UMKM juga dapat digunakan sebagai alat

untuk melindungi dari perubahan kondisi ekonomi dan resistensi terhadapnya. Oleh karena itu, sangat perlu untuk lebih menggali potensi usaha kecil, menengah, dan mikro baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Menurut Donald L. Kirkpatrick (2018) yang dimaksud dengan Perkembangan usaha adalah “Suatu proses yang bertahap-tahap, yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan sikap, prestasi kerja orang-orang yang memegang tanggung jawab manajerial usaha, secara umum pengembangan manajerial dikenal sebagai usaha untuk meningkatkan prestasi dan juga pertumbuhan organisasi”. Dalam mengembangkan usaha kecil, menengah, dan mikro di Kota Makassar, terdapat banyak kendala seperti kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, biaya yang terbatas, dan kemampuan pemasaran yang terbatas. Terlepas dari kendala tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar berperan penting dalam mengemban tanggung jawab pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah menerapkan beberapa strategi dalam pengembangan UMKM itu sendiri, diantaranya strategi penguatan, perlindungan dan pemberdayaan. Ketiga strategi tersebut kemudian diimplementasikan melalui beberapa proyek yang telah dilaksanakan.

Terkait pengembangan sektor UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, maka akan dibahas dalam beberapa indikator berikut :

a. Strategi

Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan

sebuah organisasi, salah satunya adalah strategi, baik itu strategi menjalankan organisasi maupun strategi perumusan kebijakan. Menurut Marrus (2015) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar mengupayakan kebijakan dan cara untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan mendukung usaha kecil. Keduanya fokus pada sistem pendukung bisnis, serta keunggulan kompetitif bagi pengusaha. Mereka juga mengejar kebijakan yang mendorong standarisasi produk usaha mikro. Bersamaan dengan tujuan ini adalah perbaikan manajemen koperasi, khususnya di bidang pengelolaan usaha mikro berbasis kewirausahaan.

Sebagai perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Fandy Wiranto Iqbal menyatakan bahwa :

“Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Makassar tentunya kita memiliki standar dan sasaran dimana kemudahan yang diberikan bagi masyarakat dalam memulai usaha dapat mengurangi resiko terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang kemudian nantinya akan berdampak pada perekonomian masyarakat, rencana dari strategi

pengembangan UKM ini juga direncanakan sejak lama kalau tidak salah sejak 2015”(Wawancara tanggal 2 September 2022).

Pada wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Makassar di susun secara sistematis guna untuk memenuhi standar ataupun sasaran dari kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Makassar adalah untuk mengurangi resiko terjadinya penurunan kualitas hidup masyarakat yang akan berdampak pada perputaran ekonomi, dimana dengan kemudahan pengurusan perizinan usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar secara tidak langsung dapat membantu kestabilan ekonomi masyarakat karena adanya izin usaha yang di peroleh. Tidak hanya itu dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar juga menysasar peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha mikro serta peningkatan koperasi yang aktif adapun rencana dari strategi pengembangan ini telah direncanakan pada perkiraan waktu tahun 2015 lalu. Dimana tindakan tersebut sesuai dengan teori pengembangan Menurut Donalt L. Kirkpatrick (2018) tentang proses perkembangan yang di susun secara sistematis untuk meningkatkan pertumbuhan organisasi.

1. Pengumpulan data UMKM

Menurut Uceo (2016), Pengumpulan data adalah sesuatu yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut

dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam.

Dalam melakukan pengembangan UMKM, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi terkait jumlah keseluruhan UMKM yang terdaftar yang ada di kota Makassar . Sebagaimana hasil wawancara dengan Fandy Wiranto Iqbal Hafid, S.STP Selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, mengatakan bahwa :

“Berbicara tentang pengembangan, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu informasi terkait UMKM yang ada di Kota Makassar, biar bisa menjadi data base dinas koperasi juga” (Wawancara tanggal 2 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di jelaskan bahwa dalam merencanakan suatu program pengembangan UMKM sangat penting untuk mengumpulkan data UMKM terlebih dahulu untuk memetakan potensi apa dan perencanaan seperti apa yang dibutuhkan untuk masing-masing daerah di Kota Makassar untuk program pengembangan UMKM.

Dengan ini penulis menganalisis bahwa hasil wawancara dengan bapak Fandy Wiranto Iqbal Hafid S.STP Selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan teori pengumpulan data yang penulis jelaskan sebelumnya , yaitu perlunya melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mencapai tujuan penelitian dimana dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan proses pengumpulan data untuk dapat di teliti secara mendalam(Uceo,2016). Dari hasil wawancara tersebut

maka dinas Koperasi dan UKM kota Makassar telah mengumpulkan data terkait jumlah UMKM di Kota Makassar dari tahun ketahun yaitu terdapat 2683 total keseluruhan jumlah UMKM dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah UMKM Kota Makassar pada tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Mariso	517
2	Mamajang	81
3	Tamalate	157
4	Makassar	149
5	Ujung Pandang	364
6	Wajo	25
7	Bontoala	381
8	Ujung Tanah	8
9	Tallo	82
10	Panakkukang	176
11	Biringkanaya	63
12	Tamalanrea	25
13	Rapoccini	408
14	Manggala	323
15	Sangkarrang	5
TOTAL		2683

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM kota Makassar

Gambar 5
Jumlah UMKM di Kota Makassar Tahun 2019

NO	KECAMATAN	SEKTOR				TOTAL	KET
		PERDAGANGAN	ANEKA USAHA	INDUSTRI PERTANIAN	INDUSTRI NON PERTANIAN		
1	MAKASSAR	543	73	96	216	928	-
2	BONTOALA	393	80	108	295	876	-
3	MAMAJANG	253	55	60	194	562	-
4	TAMALATE	356	65	111	196	728	-
5	RAPPOCINI	667	58	113	148	986	-
6	MARISO	416	53	112	155	736	-
JUMLAH		2628	384	600	1204	4816	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar

Gambar 6
Jumlah UMKM di Kota Makassar Tahun 2020

NO	KECAMATAN	SEKTOR				TOTAL	KET
		PERDAGANGAN	ANEKA USAHA	INDUSTRI PERTANIAN	INDUSTRI NON PERTANIAN		
1	MAKASSAR	551	78	98	229	956	-
2	BONTOALA	405	81	108	298	892	-
3	MAMAJANG	255	58	64	194	571	-
4	TAMALATE	372	70	111	201	754	-
5	RAPPOCINI	682	83	114	150	1029	-
6	MARISO	421	60	116	163	760	-
JUMLAH		2686	430	611	1235	4962	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar

Berdasarkan data pada ketiga tabel diatas, tentunya terdapat peningkatan jumlah pelaku UMKM di kota Makassar, meskipun pada tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19 hal tersebut justru menjadi salah satu alasan banyaknya usaha baru yang terbuka dikarenakan banyak pegawai yang dirumahkan dan untuk menyambung hidup banyak masyarakat yang membangun usaha. Hal ini kemudian sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan A. Tenri Beda,.S.AP selaku kepala bidang UKM :

“Dulu waktu ditahun 2019 awal-awal Covid-19 kan banyak pegawai yang dirumahkan, nah hal itu justru menjadi salah satu faktor kenapa banyak orang yang membangun usaha karena butuh juga biaya untuk bertahan hidup” (Wawancara tanggal 3 September 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2019 disaat

Covid-19 mulai merebak, ada banyak sekali pegawai yang terpaksa harus di rumahkan maka dari itu banyak masyarakat yang memulai membangun usaha guna untuk dapat memperoleh penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ada banyak hal yang perlu di perhatikan dalam proses pengembangan UMKM melihat ada banyak tantangan yang harus dihadapi UMKM pasca pandemi Covid19, persiapan sumberdaya manusia untuk UMKM sudah dilakukan secara signifikan. Peningkatan jumlah sumber daya manusia UMKM yang mendapatkan pelatihan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 400 orang, tahun 2016 sebanyak 2710 orang, dan tahun 2017 sebanyak 3549 orang. Selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan yang berturut-turut dan signifikan (Gunawan,2022)

Seharusnya peningkatan pelatihan untuk SDM UMKM Kota Makassar dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan UMKM, sebab adanya penambahan skill dapat membantu peningkatan produksi. Keterampilan tersebut seharusnya menjadi stimulan pada UMKM untuk bagaimana mengelola usaha dengan efektif dan efisien. Terlebih lagi pelatihan yang dilakukan sangat operasional seperti pelatihan model penataan dan pengelolaan KUKM, Bimbingan Teknik Pengelolaan Permodalan UKM, Pelatihan keterampilan sablon/percetakan bagi anggota koperasi dan UKM, pelatihan usaha Perbengkelan dan pertukangan.

A. Tenri Beda,.S.AP selaku kepala bidang UKM juga menjelaskan bahwa :

“sebenarnya pelatihan baik itu untuk pegawai ataupun pelaku UMKM bisa saja mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu perkembangan UMKM,

dikarenakan hal tersebut juga merupakan hal paling dasar yang harus dimiliki, karena kalau pegawai maupun pelaku usaha tidak paham apa-apa, maka sulit juga bagi instansi dalam merancang program pengembangan UMKM”

Maka dari keterangan tersebut dijelaskan bahwa kualitas pelatihan dan kompetensi pegawai dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sangat memungkinkan dalam memberikan pengaruh proses pengembangan UMKM, bisa saja berpengaruh negatif dan bisa saja positif. Dalam wawancara tersebut, A. Tenri Beda juga menjelaskan bahwa proses pengembangan UMKM di Kota Makassar tidak hanya berjalan karena upaya dari dinas Koperasi dan UKM kota Makassar melainkan juga campur tangan pemerintah kota dan partisipasi dari para pelaku usaha yang dimana penyusunan rencana pengembangan ini baru jelas terpaparkan pada saat Covid 19 mulai masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 2019.

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian ,Puterwan Idah Wahid,S.Sos.,M.Si. Pada wawancaranya beliau menjelaskan bahwa :

“Dari hasil survey pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terkait program pelatihan yang telah di laksanakan, ada banyak sekali pelaku usaha yang pro dan kontra terhadap program tersebut, beberapa di antara mereka berpendapat bahwa program pelatihan ini cukup membantu pelaku usaha dala meningkatkan usahanya, namun tidak sedikit juga berpendapat bahwa program tersebut kurang berpengaruh, tapi semua kembali lagi pada pribadi

masing-masing pelaku usaha seberapa niat mereka ingin mengembangkan usahanya”.

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa program pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tidak selamanya di terima positif oleh masyarakat, berpengaruh atau tidak program pelatihan tersebut semua tergantung oleh masing-masing pelaku usaha sejauh mana keinginan mereka mengembangkan usahanya.

Gomes dalam Charismi (2016) mengatakan menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu program pelatihan dapat dievaluasi berdasarkan informasi yang diperoleh pada lima tingkatan, antara lain

1. Reactions, yaitu untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program pelatihan, setelah mengikuti pelatihan para peserta ditanya mengenai seberapa jauh mereka puas terhadap pelatihan secara keseluruhan, terhadap pemateri, materi yang disampaikan, isinya, bahan-bahan yang disediakan, dan lingkungan pelatihan.
2. Learning, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh para peserta menguasai konsep-konsep, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diberikan selama pelatihan
3. Behaviors, menilai dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan, dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan performansi mereka
4. Organizational result, yaitu untuk menguji dampak pelatihan terhadap

kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan

5. Cost effectivity, dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan.

Dalam hal ini, terdapat 13,33% pelaku usaha yang merasa peran Diskop dalam pendampingan UMKM seperti program pelatihan sangat baik, dan 53,33% Pelaku usaha merasa cukup baik. Meski begitu juga terdapat 20% pelaku usaha merasa program pelatihan tersebut kurang baik dan, 13,34% merasa sangat tidak baik. Maka hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis yang dinyatakan diatas bahwa sebenarnya pelatihan bisa saja mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu perkembangan UMKM (Smber, Data dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar).

2. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM

Coleman Woodbury mendefinisikan perencanaan sebagai “the process of preparing, in advance, and in a reasonably systematic fashion, recommendations for policies and courses of action, with careful attention given to their possible by-products, side effects, or „spillover effects”. Berdasarkan pengertian ini, perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, pemilihan alternatif, serta pelaksanaan yang dilakukan secara logis dan sistimatik sehingga berbagai kemungkinan yang diakibatkan dapat diprakirakan dan diantisipasi. Mencermati pengertian ini, dapat dipahami bahwa bagaimana pun baiknya perencanaan, akan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, setiap perencana harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul akibat dari implementasi rencana yang dibuatnya (Hafi

Setiadi, 2014).

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan UMKM dikota Makassar telah di persiapkan beberapa rancangan program, dalam proses wawancara Kasubag Perencanaan dan Pelaporan tersebut juga mengatakan:

“Terdapat beberapa program yang telah dijalankan pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai Bulan Mei, diantaranya kita bekerjasama dengan perusahaan retail dan juga perbankan seperti bank Mandiri dan BRI, dan masih ada beberapa program lainnya dimana dalam rentan waktu tersebut terjadi perkembangan UMKM yang sangat signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan yang diterapkan cukup efektif dalam hal ini”

(Wawancara tanggal 2 September 2022).

Adapun keabsahan dari hasil wawancara diatas dikuatkan oleh data pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Kota Makassar

NO.	Program Pendukung	Tujuan	Waktu
1.	Bekerjasama dengan pihak Perbankan (Mandiri dan BRI) dalam membina UKM pada setiap pelatihan	Mengupayakan peran perbankan dalam membina UKM dalam hal pengelolaan keuangan dan permodalan	Berkelanjutan
2.	Mendorong setiap pemerintah kecamatan untuk membina warganya dalam mendukung program kota menciptakan 1000 UKM lorong	Meningkatkan produktifitas masyarakat lorong untuk meningkatkan industri rumah tangga disetiap kecamatan	Berkelanjutan

3.	Bekerjasama dengan pihak perusahaan Swalayan (Carrefour) dan Retail untuk memasukkan Produk-Produk UKM disetiap cabangnya	Mendorong UKM agar mampu menciptakan produk yang unggul dan berkualitas agar mampu bersaing dengan produk luar daerah	Berkelanjutan
4.	Melibatkan Komunikasi entrepreneur dalam membina UMKM baik secara teknis maupun manajemen kelembagaan UKM	Meningkatkan semangat wirausaha berbasis komunitas yang ada di kota Makassar	Berkelanjutan
5.	Bekerjasama dengan Google melalui program GAPURA dalam mendorong UKM untuk Go Online	Mendorong UKM untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pemasaran produk	Mei

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Tabel diatas merupakan beberapa bentuk program dari strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menganalisis bahwa dalam proses pengembangan serta pemberdayaan UMKM di Kota Makassar terdapat kebijakan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh izin usaha, tidak hanya itu dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar juga melakukan beberapa program yang berkelanjutan sebagai salah satu bentuk strateginya dalam meningkatkan jumlah UKM di Kota Makassar, dimana dari program-program tersebut yang tadinya di bulan januari 2021 hanya terdapat 34% UMKM yang ada di Kota makassar meningkat menjadi 85,1% di bulan Mei 2021, berikut data tabelnya terlampir :

Tabel 4.3
Peningkatan UMKM Kota Makassar Tahun 2021

No.	Bulan	Peningkatan UMKM Kota Makassar (%)
1.	Januari	34%
2.	Februari	47%
3.	Maret	71%
4.	April	84%
5.	Mei	85,1%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa ditahun 2021 mulai dari januari sampai bulan mei mengalami peningkatan UMKM di Kota Makassar, perkembangan tersebut terjadi di tahun yang sama pada saat program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dilaksanakan. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi tolak ukur bahwa implementasi dari program yang telah dijelaskan diatas cukup berpengaruh terhadap peningkatan UMKM Kota Makassar seperti yang telah penulis lampirkan pada tabel 7 terkait peningkatan UMKM yang terjadi di Kota Makassar.

C. Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Provinsi SULSEL.

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu (pertama) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (Kedua) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Suharto,2017).

Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

tujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya.

Peran pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar tentunya sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan UMKM. Program dari Dinas Koperasi dan UMKM salah satunya adalah melakukan

pemberdayaan pada UMKM di Kota Makassar yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Maka dari itu, segala upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan untuk mendorong, memberdayakan, serta menjadi wadah bagi seluruh UMKM agar dapat berkembang.

1. Revitalisasi Peran Koperasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2002).

Dalam proses wawancara, A. Tenri Beda juga menjelaskan terkait rencana revitalisasi :

“Ada rencana revitalisasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM

sendiri, salah satu contoh program revitalisasi Kanrerong yang seharusnya dilaksanakan tahun ini, tetapi terdapat beberapa kendala jadi revitalisasi kanrerong ini akan dilanjutkan ditahun depan” (Wawancara 3 September,2022)

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar merencanakan sebuah program revitalisasi tersebut dilakukan oleh pihak dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan normalnya program revitalisasi ini akan berjalan ditahun 2023. Menurut A.Tenri Beda program revitalisasi ini sangat penting dalam proses pemberdayaan UMKM karena dapat membantu para pelaku usaha agar produknya menjadi lebih memiliki nilai daya saing yang baik.

Berdasarkan informasi data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar yang diperoleh penulis pada penelitian, rencana revitalisasi program Kanrerong akan di relokasi ke beberapa kecamatan pada tahun 2023. Pada saat ini sudah ada 73 lapak yang terdistribusi ke 7 kecamatan. Rinciannya, 11 lapak di Kecamatan Ujung Pandang, 8 lapak di Kecamatan Wajo, 10 lapak di Kecamatan Mariso, 10 lapak di Kecamatan Manggala, 12 lapak di Kecamatan Rappocini, 14 lapak di Kecamatan Biringkanaya, dan 8 lapak di Kecamatan Tallo.

2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk mendesain proses pengembangan dan perencanaan SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi, diperlukan perencanaan sistematis yang terintegrasi yaitu Pertama, perencanaan strategik yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup

perusahaan dalam lingkungan persaingan dan memberikan forecast kebutuhan SDM jangka panjang. Kedua, perencanaan operasional yang menentukan kebutuhan sumber tenaga kerja dan kebutuhan sehari-hari di perusahaan. Ketiga, perencanaan SDM, yang dapat meramalkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

Realitas di Kota Makassar menggambarkan bahwa ada kecenderungan tidak seimbang antara penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan laju perubahan yang terjadi. Hal tersebut kemudian berakibat pada terjadinya distorsi antara kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian, keterampilan dan kompetensi tertentu yang tidak mampu disiapkan dari lembaga pendidikan terhadap tingkat kebutuhan sumber daya manusia di masyarakat. Padahal pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut seharusnya didapatkan dari luar lembaga pendidikan yang ada.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara penulis dengan ibu A. Tenri Beda, Sudah ada beberapa upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam memanfaatkan Sumber Daya yang ada diantaranya adalah dengan memberikan bantuan permodalan melalui program Inkubasi bank BRI dan juga beberapa bentuk pelatihan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kota Makassar.

3. Mengembangkan Potensi UMKM Kota Makassar

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan

sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungisian (Hamid,2016).Dalam mengembangkan UMKM di Kota Makassar, sangat penting untuk melihat peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan. Melihat perkembangan zaman saat ini segala hal sudah berbasis digital, maka dari itu di era digital saat ini pelaku UMKM perlu memahami digitalisasi, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan yang ada serta mampu bersaing.

Melalui informasi dari hasil wawancara penulis di dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dalam mengembangkan potensi UMKM di Kota Makassar , Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Strategi Penerapan Digitalisasi untuk UMKM Melalui Marketplace. Kemudian A.Tenri Beda, S.AP melalui wawancara dengan penulis mengatakan :

“Agar dapat memaksimalkan pemasaran produk, ilmu strategi digitalisasi selayaknya dimiliki oleh pelaku UMKM, Potensi UMKM di Kota Makassar cukup menjanjikan, kualitasnya pun telah mampu bersaing bahkan beberapa produk UMKM telah menembus pasaran Internasional. Dengan pemahaman tentang strategi digitalisasi diharapkan potensi UMKM tersebut dapat semakin dimaksimalkan”

Dari wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa dengan potensi UMKM di Kota Makassar yang cukup menjanjikan ilmu terkait strategi digital perlu dipahami oleh pelaku UMKM, dengan begitu maka potensi UMKM di Kota Makassar bisa semakin maksimal.

Salah satu pelaku UMKM Kota Makassar yang berhasil membawa produknya ke Hongkong, Singapura hingga ke Afrika. Bahkan, usaha miliknya bisa meraup

keuntungan hingga 60 juta Rupiah per bulannya adalah Produk Kacang Bunly. Pelaku usaha kacang Bunly tersebut adalah salah satu pelaku usaha yang sudah mengikuti program Inkubasi Bisnis BRI yang di selenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, dimana dalam program tersebut pelaku usaha di berikan bantuan modal serta pelatihan terkait strategi pemasaran digital melalui marketplace, hingga saat ini Kota Makassar mengelola 1.726 UKM yang bergerak di bidang makanan, tata busana dan kerajinan tangan. 38% dari UMKM yang dibina sudah Go Online yang artinya UMKM tersebut yang telah listing di marketplace, tidak hanya itu ada banyak pelaku UMKM saat ini yang memanfaatkan teknologi digital sebagai metode transaksinya atau pembayaran salah satunya adalah café Tetes Kopi , menyediakan pembayaran melalui Qris atau scan barcode. (Sumber informasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada proses rencana pengembangan UMKM oleh dinas koperasi dan UKM Kota Makassar terdapat beberapa rancangan program dan bentuk revitalisasi yang bertujuan selain untuk memajukan UMKM juga untuk meningkatkan perekonomian, tetapi dalam program pemberdayaan terdapat beberapa hal yang berbanding terbalik sama apa yang di harapkan oleh pelaku usaha contohnya :

- 1) Program pemberdayaan yang diinginkan oleh pelaku usaha cenderung yang megarah pada peningkatan kualitas produk usaha dan program pemberdayaan yang fokus pada pelatihan pemasaran produk.
- 2) Terdapat 4 aspek yang menjadi masukan pelaku usaha terkait program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni 1) setiap program yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan analisis kebutuhan penerima manfaat. 2) Setiap program yang dilakukan diharapkan mempunyai follow-up ataupun tindak lanjut. 3) Kemudahan dalam mengakses Informasi terkait program pemberdayaan, 4) Program pelatihan yang diadakan seharusnya dapat tersosialisasi dengan baik dan merata kepada semua pelaku usaha.

B. Saran

Menurut penulis masih banyak faktor yang perlu di perhatikan dan di lakukan

oleh dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, di antaranya yang pertama adalah memberikan program pelatihan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh UMKM dan lebih memperhatikan trend masa kini agar para pelaku UMKM bisa lebih update. Dan yang kedua Adalah perlu dimaksimalkan lagi program inkubasi UMKM yang berpotensi mendapatkan bantuan permodalan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ali Zaenal. 2017. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.
- Andrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta.
- Ariani, M. N. (2017). KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA TARAKAN. Fakultas Ekonomi.
- Assery, S. 2009. Strategi Mempercepat Pemberdayaan UMKM. Harian Suara Merdeka, 27 Mei 2009.
- Dani Danuar Tri U. 2018. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang: Diponegoro Journal Of Economics Volume 2, Universitas Diponegoro Semarang
- David, Fred R, 2011. Strategic Management, Buku 1. Edisi 12 Jakarta
- Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (buku, tidak diterbitkan),
- Ismail solihin, 2009. Pengantar Manajemen (Bandung: Penerbit Erlangga)
- Hamali, Ari Yusuf. 2016. Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan. Jakarta: KENCANA.
- Harahap, Isnaini. 2016. Analisis dampak penerapan perbankan syariah terhadap sektor UMKM di Sumatera Utara, Disertasi, Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana UINSU,
- Kementerian Keuangan. 2012. Laporan tim kajian kebijakan antisipasi krisis tahun melalui program kur (Buku, tidak diterbitkan)
- Kristian, Fuad. 2006. Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Marliyah. 2016. Strategi pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM): studi kasus perbankan syariah di Sumatera Utara. Disertasi, Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana UINSU,

- Maxmore. Pengertian UMKM menurut para ahli <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html>. Diunduh pada 30 desember 2018
- Mohammad Rohedi, 2014. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Studi Kasus: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep. Skripsi
- Martua, C., & Djati, S. P. (2018). Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan yang Berdampak pada Loyalitas Pelanggan Jasa Pengiriman AB Cargo. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM*, 1(1), 10-18.
- Pratiwi, Sundari. 2016. Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatera Utara). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU,
- Rusdiana, Maulida. 2016. Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo untuk Meningkatkan Daya Saing UKM Batik pada Sentra UKM Kampong Batik Jetis Sidoarjo. Dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol 4 No. 1, Januari-April.
- Romsinah Harahap, 2017. Siti. Strategi Pengembangan Usaha Tani Kelapa Sawit di Desa Marsonja Kecamatan Labuhan Batu Selatan . Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU.
- Setyanto, A. R. (2015). KAJIAN POLA PENGEMBANGAN UMKM DI KAMPUNG BATIK LAWEYAN MELALUI MODAL SOSIAL DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS KAWASAN ASEAN.
- Sijabat, S. 2008. Potret Iklim Usaha Pemberdayaan UMKM. *Infokop*, 16. 1-17.
- Suarja, W. AR. 2007. Kebijakan Pemberdayaan UKM dan Koperasi Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan. http://smecda.com/deputi7/file_makalah/IPB-BOGOR.pdf. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.
- Suci, Y. R. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol.6 N0.1 Supriyono, 2011. Metode penelitian administrasi, AlfaBeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia

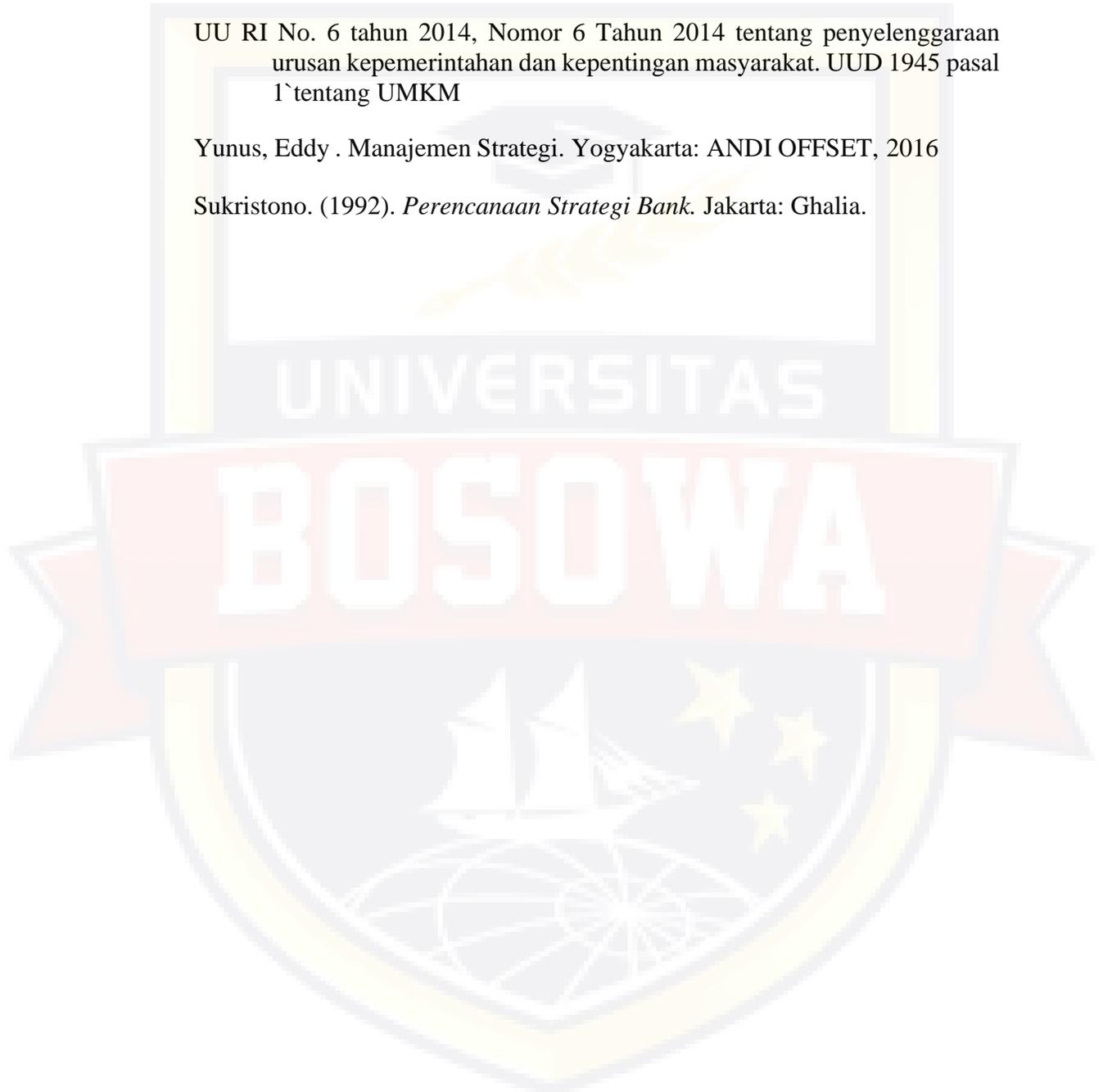
Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

UKM Sulsel Gelar Pelatihan. Makassar. Penerbit: Makassarterkini.id UU No. 20 Tahun 2018 tentang UMKM

UU RI No. 6 tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. UUD 1945 pasal 1 tentang UMKM

Yunus, Eddy . Manajemen Strategi. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2016

Sukristono. (1992). *Perencanaan Strategi Bank*. Jakarta: Ghalia.





LAMPIRAN

BOSOWA

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan :
Jenis Kelamin :
Usia :
Jabatan :
No. Telepon :

B. PENDAHULUAN

1. Memperkenalkan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa kerahasiaan informan terjamin.
3. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 20 menit Sampai 30 menit.

C. TUJUAN WAWANCARA

Untuk memperoleh informasi dan data akurat tentang Strategi Pengembangan Sektor Usaha Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi Kota Makassar dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan untuk digunakan dalam penyusunan tugas akhir penelitian.

D. KERAHASIAAN INFORMASI INFORMAN

Data dan informasi yang diberikan dalam wawancara ini dijamin kerahasiaannya dan hanya untuk keperluan penelitian.

E. PERTANYAAN WAWANCARA

No.	Indikator	Sasaran	Pertanyaan
1.	Strategi		<p>a. Apakah kebijakan strategi Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar tentang pengembangan dan pemberdayaan UMKM?</p> <p>b. Siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar?</p> <p>c. Kapan strategi Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar direncanakan ?</p> <p>d. Dalam menjalankan programnya. Dimana strategi tersebut dapat dilakukan ?</p> <p>e. Mengapa Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar memerlukan strategi dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM?</p> <p>f. Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar dalam mencapai tujuan UMKM ?</p>
2.	Pengembangan	a. Pengumpulan data UMKM	a. Apakah kualitas pelatihan dan kompetensi pegawai dinas koperasi dan UKM Kota

		<p>b. Penyusunan rencana</p> <p>c. Pelaksanaan program</p>	<p>Makassar dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pengembangan UMKM?</p> <p>b. Siapa saja pelaksana dari program pengembangan UMKM ?</p> <p>c. Kapan penyusunan rencana program pengembangan Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar dilakukan?</p> <p>d. Dimanakah Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar dalam memperoleh Sumber data dan penerima bantuan pengembangan UMKM?</p> <p>e. Mengapa Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar melakukan pelatihan pengembangan untuk UMKM ? Kualitas pelatihan yang seperti apa yang mampu mendukung keberhasilan pengembangan UMKM ?</p> <p>f. Bagaimana kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan pengembangan dan pemberdayaan UMKM?</p>
--	--	--	---

3.	Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Revitalisasi</i> peran koperasi b. <i>Revitalisasi</i> koperasi dan perkuatan UMKM c. Mengoptimalkan Pemanfaatan sumber daya d. Mengembangkan potensi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah peran koperasi terhadap pelaksanaan dari pemberdayaan UMKM sudah mencukupi kebutuhan para penerima? b. Siapa yang dapat meng-<i>revitalisasi</i> atau menghidupkan kembali UMKM yang dahulunya turun menjadi pesat ? c. Kapan potensi pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar ? d. Dimana Dinas Koperasi dan UKM bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan pada pelaksanaan program pemberdayaan ? e. Mengapa <i>revitalisasi</i> perlu dalam menjalankan pelaksanaan pemberdayaan UMKM ? f. Bagaimana dinas koperasi dan UKM Kota Makassar dalam menanggapi kendala dan masalah yang ada terkait pelaksanaan pemberdayaan UMKM ?
4.	<i>Partisipant</i> UMKM		<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam informasi terkait bantuan pengembangan dan pemberdayaan

			<p>UMKM selalu konsisten dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Apakah pelaksanaan dari strategi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM sudah mencukupi kebutuhan para penerima?</p> <p>b. Siapa yang berhak dalam strategi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan dalam program Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar ?</p> <p>c. Kapan program yang dilaksanakan dinas koperasi dan UKM Kota Makassar dapat tersalurkan oleh <i>participant</i> UMKM? Apakah dalam menyampaikan informasi terkait bantuan pengembangan dan pemberdayaan UMKM sehingga informasinya sampai ke penerima bantuan dengan jelas?</p> <p>d. Dimanakah penerima bantuan dapat memperoleh program dari Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar ?</p>
--	--	--	---

			<p>e. Mengapa bantuan dari program pengembangan dan pemberdayaan memiliki kriteria dalam mendapatkan bantuan ?</p> <p>f. Bagaimana pola penyampaian informasi dan koordinasi terkait pengembangan dan pemberdayaan UMKM? apakah melalui hierarki birokrasi ? dalam bentuk apa ?</p>
--	--	--	---

F. PENUTUP

1. Menyimpulkan hasil wawancara
2. Menyampaikan terima kasih
3. Mengakhiri wawancara.

Proses wawancara penulis di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar



Matriks Penelitian

No	Pertanyaan	DATA		
		Observasi	Teori/Jurnal	Analisis
1.	Strategi	Rencana dan arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Teori Quinn (Strategi adalah sasaran-sasaran/ kebijakan yang akan dicapai atau diwujudkan)	Dinas Koperasi Makassar merancang strategi dan kebijakan untuk mengembangkan potensi UMKM di Kota Makassar
2.	Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data UMKM b. Penyusunan rencana c. Pelaksanaan program 	Teori Kotler dan Amstrong (Pengembangan adalah proses memodifikasi atau menciptakan hal baru yang bisa dibawa ke segmen pasar)	Dalam proses pengembangan Dinas koperasi menyusun dan menjalankan beberapa program yang dapat menunjang kualitas UMKM di Kota Makassar seperti program Pelatihan
3.	Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Revitalisasi</i> peran koperasi b. <i>Revitalisasi</i> koperasi dan perkuatan UMKM c. Mengoptimalkan Pemanfaatan sumberdaya d. Mengembangkan potensi 	Jim Ife (pemberdayaan ialah suatu kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya)	Dinas Koperasi Kota Makassar merancang program revitalisasi salah satunya adalah program Kanrerong untuk membantu para pelaku usaha dalam menghidupkan kembali UMKM seperti memberikan lokasi usaha dan upgrade daya saing produk UMKM itu sendiri.
4.	Participant UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Respon Pelaku usaha terkait UMKM b. Respon Pelaku Usaha Terkait Program Pengembangan UMKM oleh Pemerintah 		Pada realitanya masih banyak UMKM yang merasa kurang puas atas program pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
Kesimpulan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi merancang strategi pengembangan untuk meningkatkan kualitas UMKM di Kota Makassar 2. Terdapat beberapa program pengembangan yang dijalankan oleh dinas Koperasi dan UKM kota Makassar salah satunya adalah pelatihan 3. Masih banyak pelaku usaha yang kurang puas atas program pengembangan dan pemberdayaan dinas Koperasi Kota Makassar. 		